

**SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI KASUS
PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA
(STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
1 (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
Dengan Minat Utama Reformasi Pemerintahan**

Disusun Oleh:

RIFDATUL KHURIYAH

125120607111037



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2018

**SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI
KASUS PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA
INDONESIA**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)

S K R I P S I

Disusun oleh:

Rifdatul Khuriyah

NIM. 125120607111037

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 2016077910241001

Andi Setiawan. S.IP., M.Si
NIP. 2013048708211001

SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA

(STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)

S K R I P S I

Disusun oleh:

Rifdatul Khurivah

NIM. 125120607111037

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian kompre Sarjana Ilmu sosial dan ilmu
Politik
pada tanggal Selasa 10 Juli 2018

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 2016077910241001

Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIP. 2013048708211001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dr. George Towar Ikbal, T, S.IP., M.Si
NIP. 2010088511111001

Barqah Prantama, S.AP., M.AP
NIP.

Malang, 10 Juli 2018
Dekan

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIP. 19690814199402 1 001

P E R N Y A T A A N

Nama : Rifdatul Khuriyah

NIM : 125120607111037

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 10 Juli 2018
Yang membuat pernyataan

Rifdatul Khuriyah

NIM. 125120607111037

ABSTRAK

Rifdatul Khuriyah. 2018. Sinergi Lintas Sektor Dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Brawijaya.

Dosen Pembimbing: Dr. M. Lukman Hakim, S.IP.,M.Si dan Andi Setiawan, S.IP.,M.Si

Tingginya angka Perceraian di kabupaten Ponorogo menjadi sorotan dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPRD, Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo adanya permasalahan yang terjadi antara lain tingginya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo yang kebanyakan berprofesi sebagai TKI. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sinergi lintas sektor dalam menanggulangi kasus perceraian keluarga tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori koordinasi Drs.H. Malayu S.P Hasibuan. Peneliti ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, Dokumentasi. Hasil dari Penelitian pada koordinasi yang dilakukan yang berada dilapangan yaitu peneliti mendapatkan bahwa kurangnya peran komunikasi organisasi yang terus berjalan dalam mengatasi permasalahan perceraian. Contohnya saja Peraturan daerah yang berkaitan tentang TKI tidak diperbolehkan bercerai sebelum kontrak kerjanya habis yang tak kunjung di implementasikan, terdapat Faktor faktor yang memengaruhi gagalnya proses mediasi. Yakni Penggugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi Apabila Penggugat tidak datang menghadap forum Mediasi, maka Hakim Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses Mediasi, karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, karena tidak adanya keseriusan dalam menjalani proses Mediasi, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator, Dalam koordinasi Pembagian kerja, seharusnya terdapat program yang lebih spesifik Dalam melaksanakan penanganan kasus perceraian TKI. Contohnya dalam menangani masalah faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi itu gagal. Dimana sangat terlihat bagaimana kurangnya koordinasi dalam mengatasi faktor-faktor tersebut.

Kata Kunci :Sinergi lintas sektor, koordinasi, Angka perceraian tinggi

ABSTRACT

Rifdatul Khuriyah. 2018. *Cross-Sector Synergy in Tackling the Case of Divorce of Indonesian Workers' Family (Case Study in Ponorogo District). Thesis. Department of Governmental Studies. Faculty of Social and Political Science, University of Brawijaya.*

Supervisor : Dr. M. Lukman Hakim, S.IP.,M.Si and Andi Setiawan, S.IP.,M.Si

The high number of divorce in Ponorogo regency is highlighted by various related institutions such as Social Service of Manpower and Transmigration, DPRD, Religious Court of Ponorogo Regency, there are problems that occur such as high divorce rate in Ponorogo Regency which mostly work as TKI. This research is to know how the cross-sector synergy in tackling the case of divorce of Indonesian labor family in Ponorogo Regency by using coordination theory of Drs.H. Malayu S.P Hasibuan. This research uses qualitative descriptive method. The collecting technique is interview, observation, documentation. The result of the research on the coordination done in the field that is the researcher get that lack of role of organizational communication that keep running in overcoming divorce problem. For example, local regulations relating to labor migrants are not allowed to divorce before their contracts run out which are not implemented, there are factors that affect the failure of the mediation process. The Plaintiff Does Not Come Over to Mediation Forum If the Plaintiff does not come to the Mediation Forum, the Mediator Judge can not reconcile the divorce case by the Mediation process, because the litigant is only one party present, in the absence of seriousness in the Mediation process, then the Mediation process otherwise failed by the Mediator Judge, In coordination Division of labor, there should be a more specific program In carrying out the handling of cases of divorce of labor migrants. For example in handling the problem of factors that caused the mediation process to fail. Where is very visible how the lack of coordination in overcoming these factors.

Keywords: *Cross-sector synergy, coordination, Divorce rate high.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah rabbilalamin. Rasa syukur dan bahagia penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kuasa dan izin-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul Sinergi Lintas Sektor dalam Menanggulangi kasus perceraian keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Ponorogo), yang disusun oleh peneliti untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Minat Reformasi Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan yang diberikan oleh orang sekitar yang begitu berarti bagi penulis. Maka dari itu, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, penulis juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena limpahan rahmat taufik, Anugerah dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan skripsi dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta H.Amin,S.H., Sulastri dan kakak Agung Budi Setiawan S.H. beserta keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan yang terbaik dan tidak pernah putus asa untuk menyemangati.
3. Bapak Joko Purnomo S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si dan Bapak Andi Setiawan, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan segala masukan, arahan hingga laporan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. George Towar Ikbal T. S.IP., M.Si dan Bapak Barqah Pratama S.AP,M.AP selaku majelis penguji yang telah memberikan banyak kritik saran dan masukan hingga skripsi itu dapat terselesaikan.

6. Kepada Seluruh dosen dan Staf Program Studi Ilmu Pemerintahan atas segala ilmu dan pengalaman, waktu yang diberikan kepada penulis selama aktif sebagai mahasiswa.
7. Kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo, Bapak Sumani yang telah memberikan data dan informasi dalam penulisan skripsi.
8. Kepada DPRD Kabupaten Ponorogo, yang telah memberikan data dan informasi sehingga dapat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Vivialyta lingling, Terima kasih sudah memberikan motivasi, dukungan, membantu, dan mendoakan penulis dalam banyak hal, terutama dalam penyelesaian skripsi. Banyak saran dan masukan yang diberikannya untuk kemajuan penulis.
10. Keluarga seperjuangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UB 2012 atas segala dukungan dan kebersamaan selama ini.
11. Pihak lainnya yang juga turut membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga dapat lebih bermanfaat.

Malang, 10 Juli 2018

Rifdatul Khuriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
ABSRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Akademis	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Teori Koordinasi	15
2.2.1 Kebutuhan akan koordinasi	18
2.2.2 Tipe koordinasi.....	19
2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi	21
2.2.4 Sifat-sifat Koordinasi	31
2.2.5 Tujuan Koordinasi.....	31
2.3 Alur pikir penelitian	33

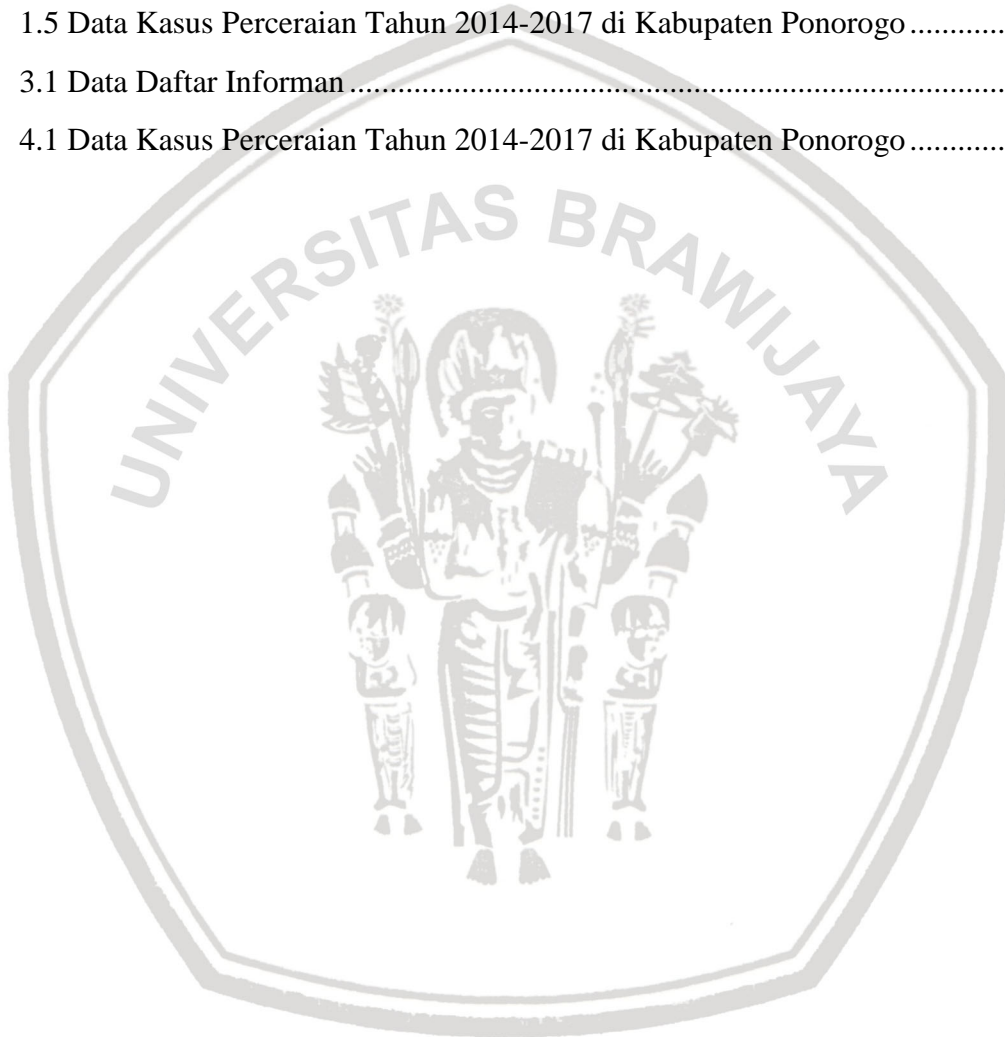
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	37
3.4 Jenis Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5.1 Wawancara.....	40
3.5.2 Studi Pustaka.....	43
3.6 Teknik analisis Data.....	43
 BAB IV GAMBARAN UMUM	 46
4.1 Kondisi perceraian di Kabupaten Ponorogo	46
4.2 Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo.....	48
4.3 Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.....	49
4.4 DPRD Kabupaten Ponorogo	50
 BAB V SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENAGGULANGI KASUS PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KABUPATEN PONOROGO	 51
5.1 Tindakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.....	54
5.1.1 Pembinaan dan pendidikan TKI oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo.....	56
5.1.2 Perijinan Surat pernyataan Anggota Keluarga bagi Calon TKI	58
5.1.3 Proses Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan agama Kabupaten Ponorogo	59
5.1.4 Faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal dalam perkara perceraian di pengadilan agama Kabupaten Ponorogo	61
5.2 Peran Komunikasi pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.....	63

5.3	Pembagian Kerja	65
5.3.1	Pengadilan agama Kabupaten Ponorogo dalam menangani kasus perceraian TKI	66
5.3.2	Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo Dalam menangani kasus perceraian TKI	67
BAB VI PENUTUP		69
6.1	Kesimpulan	69
6.2	Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA		
PEDOMAN WAWANCARA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

1.1 Data Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2015	2
1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2014	3
1.3 Data Jumlah TKI Keluar Negeri dari Provinsi Jawa Timur Tahun 2014	4
1.4 Data TKI menurut Perkecamatan Tahun 2016-2017 di Kabupaten Ponorogo	5
1.5 Data Kasus Perceraian Tahun 2014-2017 di Kabupaten Ponorogo	6
3.1 Data Daftar Informan	42
4.1 Data Kasus Perceraian Tahun 2014-2017 di Kabupaten Ponorogo	47



DAFTAR BAGAN

2.1 Bagan Alur Pikir	34
----------------------------	----



DAFTAR ISTILAH

Berkerja	: Melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan waktu yang sama memperoleh pendapatan atau keuntungan.
Cerai Gugat	: Gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
DPRD	: lembaga perwakilan rakyat daerah.
Evaluasi	: kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari
Hearing	: Suatu bentuk didkusi yng di dengar langsung oleh warga.
Informan	: Orang yang memberikan informasi tentang seseorang atau Organisasi sebuah agensi.
Instansi	: Sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi Kementrian/departemen, lembaga pemerintah non pemerintah.
Koordinasi	: Mengatur sesuatu sesuai bagian masing-masing tercapainya tujuan.
Kabupaten	: Pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi Yang di pimpin oleh seseorang bupati.
Kemnakertrans	: Lembaga kementrian pembinaan tenaga kerja dan transmigrasi.
Komunikasi	: Suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, Organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan Informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
Kualitatif	: Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung Menggunakan analisis.
Migrasi	: Perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu Tempat lain melewati batas administrasi.
Mediasi	: Upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil

keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mahkamah Agung : Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan mahkamah konstitusi dan bebas dari prngaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Organisasi : Suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan Bersama.

Pemerintahan : Semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara serta merupakan sistem struktur dan organisasi berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Perceraian : Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantar keduanya tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri.

Peraturan Daerah : Peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Pengangguran :Orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang berusaha mendapat pekerjaan yang layak.

Pusdatin : Unsur pendukung pelaksanaan tugas kementrian kesehatan di bidang data dan informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri kesehatan melalui sekretaris jendral.

Penggugat : Orang yang mengajukan tututan melalui pengadilan karena ada haknya yang diambil orang lain atau karena adanya permasalahan dengan pihak lain,yang dianggap merugikan dirinya.

Penduduk : Kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu.

Purposive	: Salah satu teknik pengambilan sample yang sering digunakan dalam penelitian.
Responden	: Semua orang baik secara individu maupun kolektif yang akan Dimintai keterangan yang diperlukan oleh pencari data.
Rekomendasi	: Suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah pernah membeli.
SKPD	: Singkatan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah pelaksanaa fungsi eksekutif yang merupaka perangkat pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Tergugat	: Orang yang dituntut mengembalikan keadilan berkaitan dengan hak-hak orang lain, atau dituntut untuk mempertanggung jawabkan kesalahan atas dakwaan pihak lain di pengadilan.
TKI	: adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
UUD	: Hukum dasar tertulis, konstitusi, pemerintah negara republik Indonesian saat ini.
Variabel	: Objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam suatu Penelitian.
Wawancara	: Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara produk atau jasa yang kemudian menceritakan berbagai pengalamannya yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut.

**SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI KASUS
PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA**

(STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO)

SKRIPSI

Disusun oleh:

Rifdatul Khurivah

NIM. 125120607111037

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian kompre Sarjana Ilmu sosial dan ilmu
Politik
pada tanggal Selasa 10 Juli 2018

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 2016077910241001

Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIP. 2013048708211001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dr. George Towar Ikbai, T. S.IP., M.Si
NIP. 2010088511111001

Barqah Prantama, S.AP., M.AP
NIP.

Malang, 10 Juli 2018

Dekan

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak
NIP. 196908141994021001



Data Pribadi

Tempat Tanggal Lahir :

Ponorogo, 11-02-1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : Lajang

Alamat : Jl. Raden Tosono
Desa, Tosanan, RT:
02, RW.03,
Kec. Kauman, Kab.
Ponorogo

KONTAK

Telepon : 085235171487

Email : rifdakhuriyah11@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Pendidikan

FORMAL

- 2000 - 2006 : SDN Tosanan
- 2006 - 2009 : SMPN 2 Kauman
- 2009 - 2012 : SMAN 1 Ponorogo

IDENTITAS PENGUJI

Tim Penguji:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si
NIP. 2016077910241001

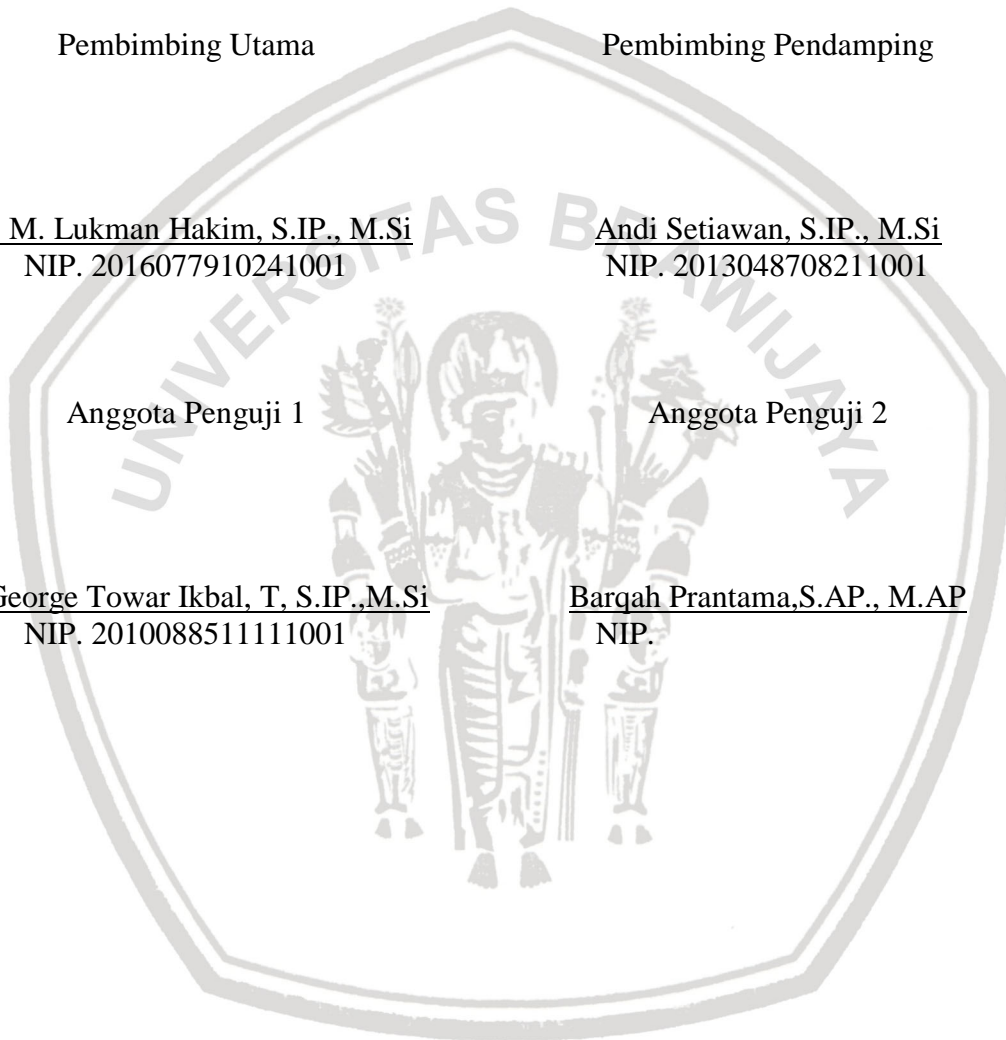
Andi Setiawan, S.IP., M.Si
NIP. 2013048708211001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dr.George Towar Ikbal, T, S.IP.,M.Si
NIP. 2010088511111001

Barqah Prantama,S.AP., M.AP
NIP.



UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan bahagia penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan kuasa dan izin-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO), yang disusun oleh peneliti untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan Minat Reformasi Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang.

Pada proses pembuatan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan begitu banyak bantuan dan dukungan yang diberikan oleh orang sekitar yang begitu berarti bagi penulis. Maka dari itu, sebagai bentuk penghargaan bagi mereka, penulis juga menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Allah SWT karena limpahan rahmat taufik, Anugerah dan hidayahNya saya dapat menyelesaikan skripsi dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan.
2. Bapak Dr. M. Lukman Hakim, S.IP., M.Si dan Bapak Andi Setiawan S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan segala masukan, arahan hingga laporan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Dr. George Towar Ikbal, T., S.IP., M.Si dan Bapak Barqah Prantama, S.AP., M.AP selaku majelis penguji yang telah memberikan banyak kritik saran dan masukan hingga skripsi itu dapat terselesaikan.
4. Universitas Brawijaya, selaku kampus tercinta yang telah menerima serta mendidik penulis untuk menjadi sarjana yang berkualitas.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam proses penyusunan laporan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga dapat lebih bermanfaat.

Malang, 10 Juli 2018

Rifdatul Khuriyah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Permasalahan kependudukan masih menjadi bahan penting untuk dibahas secara akademisi. Begitu pentingnya banyak penelitian yang mengangkat tentang isu-isu kependudukan untuk kemudian dijadikan bahan referensi baik oleh pemerintah, swasta atau pihak lainnya. Contoh dari persoalan tersebut adalah kepadatan penduduk, merosotnya kesejahteraan sosial, kurangnya lapangan pekerjaan, pengangguran atau titik fokus yang lain. Selanjutnya dari persoalan-persoalan di atas menjadi bahan penting bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan yang setidaknya tidak merugikan masyarakatnya tetapi membuat masyarakatnya lebih maju.

Penduduk menjadi titik sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang selanjutnya data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada umumnya tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan kondisi pengangguran yang semakin tahun semakin tinggi. Pengangguran yang terjadi di Indonesia masih menjadi sebuah tugas besar yang harus diselesaikan pemerintah karena hal ini merupakan masalah yang cukup serius.

Tabel 1.1**Data Angka Pengangguran terbuka tahun 2012 – 2015**

No	Tahun	Jumlah	Persen
1	2012	7.244.956	6,1%
2	2013	7.388.737	6,2%
3	2014	7.244.905	5,9%
4	2015	7.554.767	6,4%

Sumber : Pusat Data Informasi dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data Informasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, pada tahun 2012-2015 yang di jelaskan pada tabel diatas angka pengangguran terbuka dari tahun ketahun terus meningkat meskipun turun tapi masih ada peningkatan.¹

Jumlah pengangguran yang dari tahun ke tahun meningkat menjadi gambaran yang jelas, bahwa diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup luas dan memadai atau berbanding lurus dengan jumlah pengangguran. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang kurang di Indonesia ini yang menjadi alasan seseorang untuk mencari pekerjaan keluar negeri. Di sisi lain, faktor utama seseorang bekerja ke luar negeri adalah karena kebutuhan dasar dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berharap mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pada bekerja di dalam negeri. Di bawah ini adalah data jumlah Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan provinsi tahun 2014.

¹<http://www.naker.go.id> di akses pada tanggal 12 September 2015

Tabel 1.2
Data Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
Berdasarkan Provinsi Tahun 2014

No	Provinsi	Jumlah TKI
1	Jawa Barat	105.479
2	Jawa Tengah	92.590
3	Jawa Timur	73.306
4	Nusa Tenggara Barat	61.139
5	Lampung	18.500
6	Sumatera Utara	14.782
7	Banten	9.720
8	Bali	7.716
9.	DKI Jakarta	7.561
10	Sulawesi Selatan	7.497

Sumber: BNP2TKI, 2014

Dari data diatas jumlah Buruh migran atau TKI yang bekerja di luar negeri dari Indonesia ini sangatlah tinggi,dilihat dari data yang ada di Jawa Timur ini jumlah TKI lumayan tinggi dengan menduduki urutan nomor tiga dengan jumlah juga lumayan banyak.²Di Indonesia memang kebanyakanpenduduknya memilih menjadi TKI karena lebih mudah untuk mencari pekerjaan. Selain itu mereka yang pergi keluar negeri juga ada banyak pilihan negara tujuan mereka untuk bekerja nantinya beberapa Negara pilihan yang ingin mereka bekerja misalnya di Asia seperti:Malaysia, Taiwan, Saudi Arabia, Singapura, Hongkong, Brunei Darussalam, Abudabi dan masih banyak negara-negara lainnya.

²<http://www.bnp2tki.go.id/diakses> pada tanggal 1 November 2014

Tabel: 1.3**Data Jumlah TKI ke Luar Negeri dari Proivinsi Jawa Timur Tahun 2014**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1.	Ponorogo	7.520
2.	Malang (Kabupaten)	7.016
3.	Blitar	6.675
4.	Banyuwangi	6.114
5.	Tulungagung	5.562

Sumber: BNP2TKI,2014

Dari Data di atas dijelaskan bahwa jumlah TKI keluar Negeri di Kabupaten Ponorogo menduduki nomor satu untuk itu sudah jelas bahwa masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang memilih untuk bekerja keluar negeri dari pada di dalam negeri banyak dibandingkan dengan daerah lain, dan daerah yang rendah diantara lima besar adalah Kabupaten Tulungagung.³

Sementara itu berdasarkan data pada tahun-tahun sebelumnya masih menunjukan pola yang konsisten dengan Kabupaten/Kota yang sama dan jumlah TKI keluar Negeri banyak,yaitu Kabupaten Ponorogo, Malang dan Blitar.Dengan banyaknya jumlah tersebut ternyata berbanding lurus dengan jumlah angka perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun yang kebanyakan yang bercerai itu berprofesi sebagai TKI.

³ <http://www.bnp2tki.go.id/>. diakses pada tanggal 12 desember 2014

Tabel 1.4
Data TKI Menurut Kecamatan Tahun 2016-2017
di Kabupaten Ponorogo

No	Kecamatan	Tahun 2016 Jumlah	Tahun 2017 Jumlah
1.	Ngrayun	135	145
2.	Slahung	283	292
3.	Bungkal	216	220
4.	Sambit	173	150
5.	Sawoo	246	257
6.	Sooko	101	87
7.	Pudak	32	28
8.	Pulung	278	255
9.	Mlarak	138	123
10.	Siman	203	166
11.	Jetis	135	122
12.	Balong	336	367
13.	Kauman	292	282
14.	Jambon	325	373
15.	Badegan	112	120
16.	Sampung	231	185
17.	Sukorejo	478	487
18.	Ponorogo	248	210
19.	Babadan	411	423
20.	Jenangan	411	427
21.	Ngebel	118	121
	Jumlah	4902	4840

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo

Dari data diatas di jelaskan bahwa di Kabupaten Ponorogo yang bekerja sebagai TKI itu jumlahnya banyak atau tinggi, karena memang di Kabupaten Ponorogo itu kurang lapangan Pekerjaannya.Selain minimnya lapangan pekerjaan masyarakat Kabupaten Ponorogo Pendidikannya juga kurang diperhatikan jadi sulit untuk mencari pekerjaan yang penghasilannya tinggi.

Jadi mereka lebih memilih bekerja keluar negeri karena dirasa mudah untuk mencari uang, tanpa pendidikan yang tinggi dan gajinya pun lebih banyak dan bisa merubah perekonomian dan biaya kebutuhan di rumah. kebanyakan pekerjaan yang mudah kalo di rumah hanya petani. Dan apalagi banyak melihat temannya yang sukses keluar negeri sampai bisa membangun rumah dan bisa memperbaiki perekonomian di rumah jadi mereka lebih semangat lagi untuk bekerja keluar negeri.

Tabel 1.5

Data Kasus Perceraian Tahun 2014-2017 di Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Jumlah
1.	2014	2.091
2.	2015	2.015
3.	2016	2.170
4.	2017	1.940

Sumber : Pengadilan Agama 2018

Data di atas menjelaskan bahwa jumlah angka perceraian di Kabupaten Ponorogo meningkat dari tahun ketahun meskipun mengalami penurunan itupun juga sedikit, dari banyaknya angka perceraian tersebut mereka kebanyakan berprofesi sebagai TKI. Banyaknya Para TKI yang bercerai salah satunya disebabkan karena mudahnya prosedur perceraian yang ada, mereka ketika masih berada di luar negeri bisa menggugat cerai pasangannya melalui jasa pengacara.

pihak pengacara mendapat surat kuasa dari TKI yang diberikan melalui kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Dengan surat kuasa tersebut, persidangan dapat tetap berjalan dengan mewakilkan pihak yang berperkara TKI kepada pengacara.⁴Kemudahan prosedur perceraian tersebut banyak dimanfaatkan oleh TKI untuk menggugat cerai pasangannya, sehingga membuat tingginya kasus perceraian dengan di dominasi gugat cerai dari tenaga kerja Indonesia (TKI) tersebut tetapi yang banyak menggugat cerai pasangannya itu perempuan atau (TKW) yang masih berada di luar negeri.

Pada akhirnya, dari permasalahan tersebut respon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelarangan Cerai bagi Tenaga Kerja Indonesia sebelum masa kerja atau kontrak kerjanya habis belum bisa bercerai. Warga Ponorogo yang bekerja di luar negeri sebagai TKI mereka mau tidak mau harus mempertahankan rumah tangganya sebelum masa kerja atau kontrak kerja itu habis dan tidak bisa di wakikan oleh pengacara lagi sebelum kembali ke indonesia dan mengurusnya sendiri yang intinya, pasangan yang salah satu atau keduanya berangkat menjadi TKI wajib membuat komitmen secara lisan hingga tertulis kepada pihak keluarga untuk tidak bercerai selama masa kerja atau kontrak kerjanya masih belum habis.

⁴http://beritajatim.com/tki_dominasi angka perceraian di ponorogo, diakses tanggal 02 Februari 2017.

Hal ini akan diatur oleh perda yang saat ini sedang dibahas di DPRD, tetapi sampai tahun 2017 Perda ini belum disetujui dan diterbitkan, padahal sudah berselang dua tahun semenjak perda tersebut dibahas dan di bicarakan akan tetapi pemerintah mengupayakan segera mungkin akan menyelesaikan masalah pembuatan peraturan Daerah tersebut supaya angka perceraian tersebut cepat menurun karena angka perceraian tersebut sampai saat ini belum menurun karena perda tersebut belum jadi.

Ada beberapa alasan mengapa penulis mengambil di Kabupaten Ponorogo, diantaranya, *pertama* karena jumlah TKI dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Ponorogo termasuk banyak yang bekerja menjadi TKI keluar negeri, yakni dengan jumlah 7.520 jiwa. Alasan pada umumnya mereka pergi bekerja ke luar negeri untuk menjadi buruh migran adalah untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, ingin mengubah perekonomian keluarga, *skill* yang kurang, pada akhirnya menjatuhkan pilihan untuk menjadi TKI. Selain itu disana juga banyak dari berbagai macam daerah dan negara selain itu mereka juga bertekad keluar negeri demi anaknya akan tetapi belum tentu disana bisa terjamin kehidupannya ada yang majikannya jahat juga ada yang baik belum lagi disana nanti bisa jadi suka dengan orang yang disana dan akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Kedua, meningkatnya jumlah kasus perceraian yang ada di Kabupaten Ponorogo yang kebanyakan berprofesi sebagai TKI. Kasus perceraian saat ini merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.⁵Kasus perceraian terjadi karena kebanyakan oleh warga yang bekerja keluar negeri suka dengan orang lain ketika di luar negeri selain itu istri atau suaminya di rumah tidak bekerja di daerah asal.Dengan adanya masalah tersebut Pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo merencanakan peraturan daerah yang melarang warganya mengajukan gugatan cerai selama bekerja menjadi tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia sebelum kembali ke Indonesia.⁶Menurut Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi mengatakan bahwa dari 2000-an kasus perceraian yang ditangani, 40% (empat puluh) persen penggugatnya berlatar belakang atau berprofesi sebagai tenaga kerja wanita (TKW) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ketiga, dalam merencanakan suatu kebijakan atau peraturan daerah, diperlukan koordinasi yang tepat supaya waktu membuat kebijakan tidak salah dan di perlukan kecepatan dalam mengambil keputusan. Disini penulis ingin mengetahui bagaimana koordinasi antar pihak yang terlibat dalam perda terkait pelarangan menggugat cerai pasangannya ketika masih menjadi buruh migran atau TKI.

⁵<http://beritajatim.com/tki> Dikutip dari *kompas.com*, edisi Jum'at (9/12/2016) bahwa Kabupaten Ponorogo terbesar ketiga se-Indonesia angka perceraian.

⁶<http://beritajatim.com/tki> Di akses pada *Kompas.com*, edisi Selasa (8/11/2016). Dalam isi surat kabar tersebut di jelaskan bahwa Rancangan perda yang melarang TKW atau TKI mengajukan cerai di pengadilan sudah dibahas di DPRD Ponorogo. Bahkan rancangan perda sudah konsultasikan ke Pemprop Jawa Timur.

Terakhir sebagai alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengambil penelitian di Kabupaten Ponorogo yang secara geografis, sosial, ekonomi dan budaya memiliki perberbedaan dengan daerah lain. Dengan demikian, persoalan perceraian yang dilakukan oleh TKI dari Kabupaten Ponorogo menarik untuk dilakukan penelitian terkait kebijakan publik dengan judul **“Sinergi Lintas Sektor dalam Menanggulangi Kasus Perceraian Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka terdapat pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, yaitu

1. Bagaimana Sinergi Lintas Sektor yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menanggulangi meningkatnya Tingkat perceraian yang kebanyakan berprofesi sebagai TKI di Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui Bagaimama Sinergi Lintas Sektor yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menanggulangi Meningkatnya angka perceraian yang kebanyakan berprofesi sebagai TKI di Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan dua manfaat, yaitu manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Sebagai penambah referensi baru tentang persoalan pengangguran terlebih tentang TKI atau TKW yang kemudian sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat, implementasi dan evaluasi suatu kebijakan.
- b. Memperoleh pengembangan pengetahuan tentang mata kuliah-mata kuliah yang diajarkan di Program Studi Ilmu Pemerintahan khususnya mata kuliah kebijakan publik.
- c. Sebagai pelengkap bagi penelitian yang memiliki tema serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi masukan dan informasi kepada pihak pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam kasus TKI.
- b. Sebagai referensi supaya mudah dipahami bagi peneliti di bidang yang sama, sehingga peneliti dapat mengembangkan hasil penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab dua ini membahas mengenai tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu, konsep atau teori penelitian, dan alur pikir penelitian. *Pertama*, penelitian terdahulu disajikan sebagai bahan kajian dari penelitian ini yang dapat dijadikan referensi. *Kedua*, konsep atau teori penelitian disajikan sebagai bahan analisis yang dapat mendukung penelitian. *Ketiga*, alur pikir disajikan sebagai kerangka dalam penulisan skripsi ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis berusaha menyajikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian akan diklasifikasikan berdasarkan judul penelitian, metode penelitian, titik pembeda, dan disertai dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu tersebut. Adapun penelitian terdahulu dengan tema Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi dengan berjudul “Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang”. Skripsi ini ditulis oleh Andreas Afriando (2014).⁷ Secara garis besar dijelaskan bahwa ada peran dan strategi SBMI dalam melakukan advokasi terhadap TKI yang ada di Kota Malang.

⁷Andreas Afriando, *Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014.

Beberapa strategi yang dijelaskan ada beberapa faktor keberhasilan dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh calon TKI. Penelitian ini fokus membahas tentang advokasi dan jaringan kerja SBMI sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah dan objeknya yaitu TKI. Persamaan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang berhubungan dengan TKI. Teori yang digunakan juga berbeda yaitu Hak Asasi Buruh Migran dan Advokasi berbasis jaringan. Pembedanya adalah fokus pembahasan yang lebih fokus pada advokasi lembaga Serikat Buruh Migran.

Kedua, “Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Migrasi Keluar Negeri”. yang ditulis oleh Febri Adi Samudro.⁸ Studi kasus berada pada wilayah dan objek yang berbeda yaitu di Kabupaten Blitar. Tulisan Febri Adi Samudro objek penelitian berpusat pada mantan TKI yang sudah kembali ke Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa variabel upah adalah salah satu bahan pertimbangan para TKI untuk melakukan migrasi keluar negeri negeri.

Ketiga, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Migrasi Sirkuler ke Kabupaten Semarang oleh Ayu Wulan Puspitasari”.⁹ Penelitian ini berbentuk jurnal dengan metode kuantitatif yang melibatkan 100 (seratus) responden dengan responden tersebut

⁸Febri Adi Samudro, *Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Migrasi Ke luar Negeri*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2010.

⁹Ayu Wulan Puspitasari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Sirkuler Ke Kabupaten Semarang*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2010.

telah melakukan migrasi dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Dari kesimpulan yang tertulis dalam jurnal ini bahwa sebagian yang melakukan migrasi yaitu yang belum menikah dengan alasan yang berbeda-beda. Selanjutnya tujuan penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dan pihak pihak terkait dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan migrasi di Kabupaten Semarang.

Keempat, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Migran Bekerja di Dalam Negeri dan di Luar Negeri oleh Tri Andias 2014”.¹⁰ Skripsi ini berfokus pada satu kecamatan disalah satu Kabupaten Malang dengan membahas tentang migrasi di dalam dan luar negeri. Dalam penelitiannya, tujuan keberangkatan migrasi tergantung beberapa faktor, misalnya bahwa seseorang yang berstatus menikah memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk memutuskan bermigrasi di dalam negeri dari pada ke luar negeri. Contoh tersebut terdapat di kesimpulan penelitian.

Teori yang digunakan teori migrasi dan teori jaringan kerja ditambahkan satu teori lagi yaitu teori tenaga kerja. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, dimana melibatkan pekerja migran itu sendiri.

¹⁰Tri Andias, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Migran Bekerja Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri.*, Skripsi, Universitas Brawijaya, 2014.

Kelima, “Keputusan Migrasi Sirkuler Pekerja Sektor Formal di Kota Medan” oleh Muhammad Rizal.¹¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi sirkuler di Kota Medan. Kemudian data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari para responden yang diperoleh melalui kuesioner yang dipersiapkan.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan hasil penelitiannya adalah hanya pendidikan yang berpengaruh terhadap migrasi sirkuler di Kota Medan. Perbedaan dalam rencana tulisan peneliti adalah fokus penelitian dan metode penelitian. Dengan model tersebut diperoleh hasil, secara parsial hanya variabel tingkat pendidikan yang berpengaruh terhadap migrasi sirkuler di Kota Medan. Sedangkan jenis pekerjaan, fasilitas kota, daya dorong desa dan status kepemilikan tanah tidak berpengaruh terhadap migrasi sirkuler di Kota Medan.

2.2 Teori Koordinasi

Logika umum tentang koordinasi adalah mengatur sesuatu sesuai bagian masing-masing agar terciptanya tujuan. Setiap organisasi baik organisasi swasta atau masyarakat tidak lepas dari yang namanya koordinasi, baik koordinasi berbentuk satu arah atau lebih dari satu arah.

¹¹ Muhammad Rizal, *Keputusan Migrasi Sirkuler Pekerja Sektor Formal di Kota Medan*, Skripsi, Universitas Negeri Medan, 2010.

Pengkoordinasian penting dilakukan oleh setiap pemimpin dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya informasi yang jelas, komunikasi yang tepat dan pembagian pekerjaan kepada anggotanya atau bawahannya yang diberikan oleh manajer, maka setiap anggota organisasi atau individu akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pengertian menurut ahli tentang koordinasi sangat beragam, seperti misal G.R Terry dalam Hasibuan bahwa koordinasi¹² adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. definisi G.R Terry ini berarti bahwa koordinasi adalah pernyataan usaha dan meliputi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Jumlah usaha, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha ini.
3. Pengarahan usaha-usaha ini.

Tokoh lainnya misalnya E.F.L. Breach menjelaskan pengertian koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing

¹² Malayu S.P Hasibuan. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. 2011. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 85

dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan semestinya di antara para anggota itu sendiri. Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas maka bisa disebutkan bahwa Syarat-Syarat koordinasi antara lain:¹³

1. *Sence of Cooperation*, (perasaan untuk saling berkerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
2. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
3. *Tema Spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Cara-cara mengadakan koordinasi:

1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
2. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.

¹³ *Ibid. hlm 85-88*

3. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran, dan lain sebagainya.
4. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
5. Membina *human relations* yang baik antara sesama karyawan.
6. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan. Ringkasnya, suatu koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan partisipasi dari bawahan, dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan; supaya mereka antusias dalam melaksanakannya.¹⁴

Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa proses pengintegrasian, tujuan dan aktivitas di dalam organisasi agar memiliki keselarasan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengkoordinasian yang dimaksud adalah pengkoordinasian baik sumberdaya manusia atau sumberdaya yang lainnya. Bukannya kekuatan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan dalam menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai tujuannya.

2.2.1 Kebutuhan Akan Koordinasi

Kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan organisasi berbeda dalam kebutuhan integrasi. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan akan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

¹⁴ *Ibid* hlm.88

Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah paling baik. koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. penetapan hubungan dalam suatu organisasi merupakan salah satu syarat terciptanya kerjasama (*team work*) antara karyawan dengan karyawan dan antara departemen dengan departemen.¹⁵

hubungan-hubungan dalam organisasi menurut V.A. Graicunas adalah:

1. *Direct single relation ship* (hubungan tunggal langsung) adalah hubungan antara atasan langsung dengan seseorang bawahannya.
2. *Direct group relation ship* (hubungan kelompok langsung), adalah hubungan langsung antara atasan dengan beberapa orang bawahannya.
3. *Cross relationship* (hubungan silang) adalah hubungan antara bawahan dengan bawahan yang disaksikan oleh atasan.

2.2.2 Tipe Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

¹⁵ *Ibid* hlm.123

Menurut Hasibuan tipe koordinasi di bagi menjadi dua yaitu koordinasi vertikal (*vertical coordination*) dan koordinasi horizontal (*horizontal coordination*).¹⁶

Tipe-tipe koordinasi:

1. Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.

Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung.

Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.

2. koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinory* dan *interrelate*.

Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.

¹⁶*Ibid.* hlm.86-87.

Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

2.2.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut.¹⁷

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik.

¹⁷ *Ibid.* hlm.88.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. komunikasi (*communication*) merupakan hal yang terpenting dalam manajemen. karena proses manajemen baru terlaksana. Jika komunikasi dilakukan.

Pemberian perintah, laporan, informasi, berita, saran, dan menjalin hubungan-hubungan hanya dapat dilakukan dengan komunikasi saja, tanpa komunikasi proses manajemen tidak terlaksana.¹⁸

Henry clay Lindgren mengatakan bahwa *effective leadership means effective communication* atau kepemimpinan yang efektif berarti komunikasi yang afektif.

Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.

¹⁸ *Ibid* hlm.190

Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Lawrence D. Brennan, mengemukakan bahwa *management is communication* atau manajemen adalah komunikasi.¹⁹

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai berikut:

1. *Instructive* artinya komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan perintah dari atasan kepada bawahannya.
2. *Evaluative* artinya komunikasi berfungsi untuk menyampaikan laporan dari bawahan kepada atasannya.
3. *Informative* adalah komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk menyampaikan informasi, berita, dan pesan-pesan lainnya.

¹⁹ *Ibid* hlm.191

4. *Influencing* artinya komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan saran-saran, nasehat-nasehat dari seseorang kepada orang lain.²⁰

Unsur-unsur komunikasi:

1. Komunikator (pemberi=given) adalah orang yang menyampaikan pesan komunikasi itu.
2. Pesan yaitu informasi, perintah, laporan, berita, dan lain-lainnya yang disampaikan itu.
3. Saluran (simbolis=channel) adalah alat (simbol) yang dipergunakan untuk komunikasi.
4. Komunikan (penerima=receiver) yaitu orang yang menerima pesan komunikasi tersebut.
5. Feedback (action), adalah reaksi yang ditimbulkan oleh komunikasi itu.²¹

Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mengemukakan syarat komunikasi yang baik yaitu:

1. Disampaikan pada waktu dan kondisi yang tepat.
2. Channel dan simbol-simbol komunikasi yang baik dan jelas.
3. Mempergunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan persepsinya jelas.
4. Memperhatikan kemampuan daya tangkap dan daya nalar komunikasi.

²⁰*Ibid* hlm.193

²¹*Ibid* hlm.192-193

5. Komunikator menyampaikannya dengan tenang dan tidak emosional.
6. Disampaikan secara jelas dengan menghindari hambatan-hambatan komunikasi.
7. Dilakukan dengan komunikasi dua arah (*two way traffic*).
8. Pesan disampaikan secara lengkap dan menyeluruh.
9. Jika dipahami maka terjadi reaksi (action) dan feed back positif yang menimbulkan interaksi.²²

Ruang lingkup komunikasi adalah:

1. *Public communication* (komunikasi massa) adalah komunikasi dalam arti luas, artinya pesan komunikasi itu ditujukan kepada masyarakat luas, baik yang dikenal maupun tidak. Misalnya: Tulisan dalam surat kabar, majalah, buku pidato di televisi, dan radio.
2. *Bussines communication* adalah komunikasi dalam arti sempit, artinya pesan komunikasi itu dilakukan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pesan organisasi itu biasanya berfungsi untuk instructive dan evaluatif, seperti memberikan perintah dan laporan-laporan.

Tipe-tipe komunikasi adalah:

1. Komunikasi formal (*formal communication*) adalah komunikasi dalam organisasi formal, pesannya *instructive* dan *evaluative* yang dilakukan mengikuti rangkaian hierarki formal organisasi serta hubungannya dengan tugas-tugas dan tanggung jawab.

²² *Ibid* hlm.193-194

Pesan komunikasi ini dilakukan secara vertikal dari atasan ke bawahan (perintah) atau dari bawahan ke atasan (laporan).

2. Komunikasi in formal (*informal communication = the grapevine = pohon anggur*) adalah komunikasi dalam organisasi informal atau formal. Pesan komunikasinya berfungsi informative atau evaluative, jadi tidak berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab. Komunikasi bertujuan memberikan berita atau pesan dan menciptakan hubungan-hubungan manusia. Komunikasi ini menyebar dengan cepat dan efektif dari mulut ke mulut dan tidak memperhatikan rantai hierarki formal organisasi. Pesan komunikasi berupa kabar-kabar angin, desas-desus, isu fitnah, dan lain-lainnya yang kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan perusahaan.²³

Metode komunikasi adalah:

1. Komunikasi langsung, jika pesan itu disampaikan secara langsung oleh komunikator kepada komunikan; umpan baliknya juga langsung.
2. Komunikasi tidak langsung, jika pesan itu disampaikan secara tidak langsung oleh komunikator kepada komunikan; umpan baliknya pun tertunda.
3. Komunikasi horizontal, jika pesan itu disampaikan seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk menjalin hubungan saja.

²³ Ibid hlm.193

4. Komunikasi searah (*one way traffic*), jika komunikasi disampaikan berupa indikratinasi dan komunikator saja yang berperan aktif sedang komunikan banyak pasif saja.

Misalnya: dalam sholat jumat hanya khotib (komunikator) saja yang berperan aktif sedang makmum (komunikan) pasif saja.

5. Komunikasi dua arah (*two way traffic*). Jika komunikator dan kominikan sama-sama berperan aktif.mereka saling bergantian menjadi komunikator dan komunikan.

Hambatan-Hambatan komunikasi adalah:

1. Hambatan sematis yaitu hambatan karena bahasa, kata-kata atau kalimat-kalimat yang diergunakan penafsirannya banyak.Misalnya, ulang bahasa batak berarti jangan, sedang ulang dalam bahasa Indonesia berarti lakukan kembali. Kampus uninus penuh dengan bunga-bunga yang menawan hati. Penafsiran kalimat ini” bisa bahwa mahasiswa uninus cantik-cantik, sedang komunikasi bermaksud menjelaskan yang sebenarnya saja”.Hambatan sematis ini dapat diatasi oleh komuniktornya.Komunikasi tertulis yang efektif,jika memenuhi 4C yaitu: complete (lengkap), clear (jelas), concise (tepat), dan correct (benar).Dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi) dan atau menjawab soal ujian hendaknya hambata sematis ini dihindarkan supaya jangan ada salah persepsi antara penguji dan yang diuji.

2. Hambatan teknis, adalah hambatan yang disebabkan oleh alat-alat teknis yang dipergunakan untuk berkomunikasi yang kurang baik. Misalnya: telepon, mikrofon yang dipergunakan kurang baik. Hambatan teknis ini berada di luar kemampuan komunikator, tetapi jika komunikator sangat berwibawa hambatan teknis ini diatasi oleh para bawahannya.
3. Hambatan biologis, adalah hambatan yang ditimbulkan oleh kurang baiknya panca indra komunikator/komunikan, misalnya gagu/tuli.
4. Hambatan psikologis, adalah hambatan kejiwaan yang disebabkan perbedaan status, dan keadaan. Misalnya antara direksi dan pesuruh.
5. Hambatan kemampuan, adalah hambatan yang disebabkan komunikan kurang mampu menangkap dan menafsirkan pesan komunikasi, sehingga dipersepsi serta dilakukan salah.²⁴

c. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*).

²⁴Ibid hlm.195

Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja atau pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas karena kemampuan seseorang itu berbeda-beda. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

d. Disiplin

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan dengan bagus.

Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu perorangan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin yang positif yakni penerapan peraturan melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin yang positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya.

Dengan demikian disiplin itu sangat penting bagi siapapun baik itu pimpinan atau bawahannya artinya dalam proses pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan yang dimaksud.

2.2.4 Sifat – sifat Koordinasi

Hasibuan berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah:²⁵

- a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator dalam rangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas Koordinasi adalah asas skala (*scalar principle*= hierarki) artinya koordinasi dilakukan menurut jenjang – jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang – jenjang yang berbeda satu sama lain. Tegasnya, asas hierarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasi bawahan langsungnya. Misalnya: manajer puncak mengkoordinasi manajer madya, manajer madya mengkoordinasi manajer lini, dan seterusnya.

2.2.5 Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah:

1. untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

²⁵ *Ibid.* hlm.87.

5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran organisasi atau perusahaan.
6. Untuk menghindari tindakan *overlapping* dari sasaran perusahaan.²⁶

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada beberapa manfaat yang didapatkan. Adapun manfaat koordinasi antara lain:

1. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi.
2. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting.
3. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi.
4. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi.
5. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Masih dalam Hasibuan. berpendapat bahwa kenapa koordinasi itu penting dalam suatu organisasi, yakni:

- a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan.
- b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan.

²⁶ *Ibid* hlm.87

- c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.
- d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi.²⁷

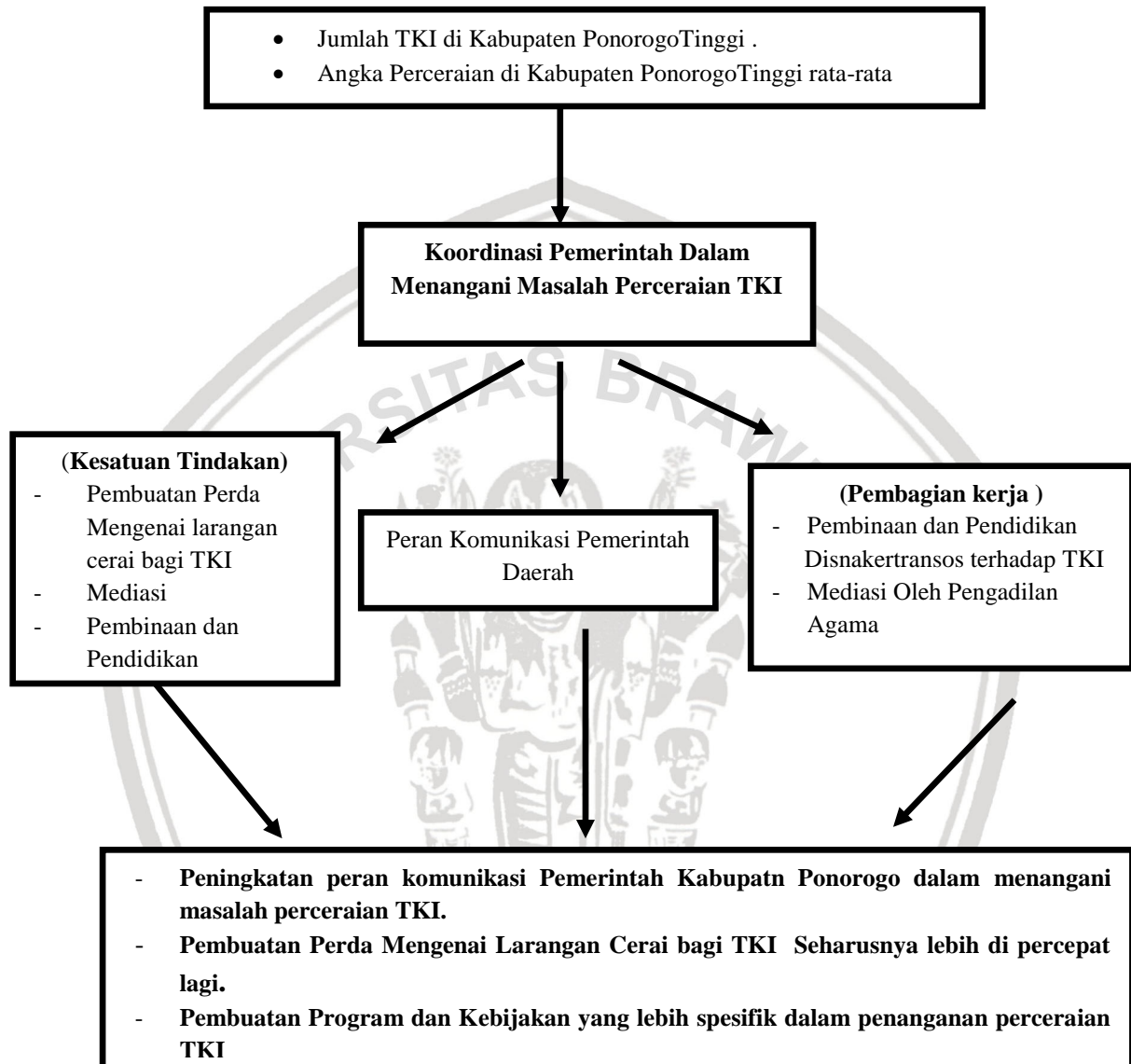
2.3 Alur Pikir Penelitian

Sebagai salah satu upaya untuk memudahkan peneliti mencari data dan menganalisis dan memaparkan hasil analisa, yang di dapatkan maka dibuat alur pikir penelitian sebagai kerangka berfikir dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan terkait latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, hingga konsep yang digunakan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menentukan alur pikir penelitian sebagai berikut:

²⁷ Ibid hlm.86

Bagan 2.1

Alur Pikir Penelitian



Sumber : Hasil olahan penulis 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berkaitan dengan jenis penelitian, fokus lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu juga pada bab ini akan menjelaskan tentang teknik analisis data.

3.1 Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif, yang di paparkan secara deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁸ Obyek dalam penelitian kualitatif yakni obyek yang alamiah (*natural setting*), yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.²⁹ Penelitian tentang koordinasi pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menanggulangi persoalan kasus perceraian yang dilakukan oleh TKI dilakukan dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian yang merupakan alat pengumpul data utama.

²⁸ Azwar Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001. Hal 5

²⁹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hal 2.

Peneliti ditempatkan sebagai pihak yang berperan aktif dalam setiap kegiatan penelitian. Kemudian, dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Dimana, laporan penelitian akan berisi sumber-sumber data yang telah diperoleh dengan cara mendeskripsikannya. Data-data yang sangat banyak tersebut dipadupadankan agar setiap sumber data dapat saling memiliki hubungan yang saling menguatkan topik penelitian dan mampu menjawab rumusan penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁰ Data diskriptif dapat dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.³¹

Adapun analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti menyusun proposal skripsi, melaksanakan pengumpulan data dilapangan, sampai peneliti mendapatkan seluruh data.³² Hasil penelitian kualitatif sendiri dapat menjadi pedoman atau referensi pada penelitian lain, selama penelitian tersebut masih memiliki karakteristik yang sama.

³⁰ Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003. Hlm 6.

³¹ *Ibid.* hlm 11.

³² Sugiyono. *Op.Cit.* hal 3. Analisis data yang bersifat induktif disini dapat dimaknai dengan analisis data yang prosesnya yakni mengambil suatu fakta, fenomena, dan peristiwa yang bersifat khusus lalu dijadikan kesimpulan yang lebih bersifat umum.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan, *pertama* di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo lebih umum pada Pemerintahan Kabupaten Ponorogo hal ini dikarenakan pengelohan data atau persoalan TKI *tercover* oleh dinas tersebut. *Kedua* DPRD Kabupaten Ponorogo, dimana sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam membuat peraturan daerah. *Ketiga*, masyarakat, dimana masyarakat yang pernah melakukan gugat cerai kepada pasangannya maupun yang belum cerai *keempat* di pengadilan agama dimana uuntuk memperoleh data perceraian *kelima* penelitian ini dibagi beberapa tingkat tinggi, rendah, sedang.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai pembatas penelitian agar penelitian terstruktur dan tidak melenceng dari fokus yang sudah ditetapkan. Peneliti mengambil fokus utama dalam menelaah strategi pemerintahan Kabupaten Ponorogo dalam persoalan kasus perceraian.

Dimana terjadi kasus yang langka yakni, terjadinya perceraian yang dilakukan oleh TKI kepada pasangannya yang pada akhirnya respon Pemerintah Kabupaten Ponorogo merancang peraturan untuk menangani kasus tersebut.

3.4 Jenis Data

Penelitian membutuhkan banyak sekali data. Data yang diperlukan adalah data yang relevan dengan topik penelitian. Data memiliki makna sebagai keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumpulkan dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri populasi yang bersangkutan.³³ Adapun jenis data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan perceraian yang dilakukan oleh TKI. Menurut Saifuddin Azwar³⁴ bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer didapatkan melalui dokumentasi beberapa obyek dan wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten dibidangnya.

Data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan beberapa pihak yang terkait antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPRD, Pengadilan Agama, dan sebagian masyarakat yang pernah menjadi TKI tetapi sudah bercerai, sedang proses perceraian, masih mempertahankan pernikahannya.

³³Richard Lungan. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006. Hal 13.

³⁴*Op.Cit.* Hlm.91.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur dan sumber-sumber lain yang tertulis dan berhubungan dengan topik penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Apabila data yang diperlukan sesuai tersedia sebagai data sekunder, maka peneliti hanya mengunjungi perpustakaan atau menjelajahi internet, misalnya menentukan sumber yang sesuai, serta mengambil dan mencatat informasi yang diinginkan, misalnya menentukan sumber yang sesuai, serta mengambil dan mencatat informasi yang diinginkan. Data sekunder ini didapatkan seperti arsip di dinas-dinas terkait yang sudah disebutkan di atas.

Kemudian, menurut Lofland dan Loftland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³⁵ Sumber data berupa kata-kata dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang memiliki informasi untuk diteliti dan sumber data dari tindakan dilakukan dengan cara observasi dari kegiatan yang dilakukan di lapangan. Sedangkan, sumber data dari data sekunder yaitu sumber data tertulis, foto, data statistik, dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dengan melihat jenis dan sumber data tersebut di atas, teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut.

³⁵ *Ibid.* hlm 157.

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan kepada orang-orang yang terkait dengan persoalan TKI, baik pemerintah, LSM, ataupun orang yang menjadi TKI.

Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.³⁶ Definisi lain menjelaskan bahwa wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.³⁷ Sebagaimana ditegaskan oleh Susan dalam Sugiyono,³⁸ yang mengatakan bahwa:

“Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation of phenomenon can be gained through observation alone”. (dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui obeservasi.)

Wawancara menjadi salah satu sumber data dalam penelitian ini yang dilakukan kepada beberap individu yang dirasa mampu menjadi informan dalam memberikan informasi. Di sisi lain, informan yang peneliti pilih yakni masyarakat, dimana masyarakat adalah yang paling merasakan dampak penggunaan dari pelayanan administrasi kependudukan atau pemerintah.

³⁶*Ibid.*, hlm 186.

³⁷ Bungin, Burhan. *Metodologi Peneliiian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.hlm 126

³⁸ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010. Hlm 72

Wawancara memiliki dua jenis yakni dapat digunakan peneliti dalam mengumpulkan data ilmiah, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur³⁹. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara yang terstruktur, dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa saja yang akan didapatkan. Adapun pengertian wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.⁴⁰

Dalam melakukan wawancara terstruktur peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mengumpulkan data dan menggunakan alat bantu, misalnya tape recorder, gambar, brosur, dan segala hal yang mendukung kelancaran wawancara.⁴¹ Dilain sisi, peneliti menggunakan wawancara terbuka karena sesuai dengan pandangan kualitatif yaitu terbuka.

Wawancara terbuka dilakukan dimana para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti seperti dijelaskan diparagraf diatas yakni wawancara terbuka dan terstruktur. Kemudian selain metode yang telah dijelaskan, untuk menetapkan narasumber dalam wawancara nantinya peneliti menggunakan teknik penentuan narasumber bertujuan yang biasa disebut *purposive*.

³⁹ James A. Black dan Dean J. Champion. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009. Hlm 306

⁴⁰ Lexy J. Moelong. *Op.cit*. hlm. 314.

⁴¹ Sugiyono. *Op.Cit*. hlm. 73.

Teknik penentuan narasumber wawancara ini digunakan untuk menentukan informan yang dipilih berdasarkan tujuan penelitian atau bisa dikatakan juga penunjukkan narasumber secara khusus yang dirasa dapat memberikan informasi terkait penelitian. Wawancara dimulai oleh peneliti dengan menentukan informan yang akan diwawancara dan dianggap penting dan utama. Selain informan utama, peneliti juga memerlukan informan tambahan sebagai informan lain yang memiliki cara pandang berbeda. Informan yang dirasa sesuai dan berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun narasumber yang ditetapkan pada penelitian ini antara lain bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Data Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Sumani	Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Ponorogo
2.	Eko	Ketua (Komisi D) DPRD Kabupaten Ponorogo
3.	Istidjam	Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo
4.	-Siti Aminah - Susanti	Masyarakat -TKI yang belum bercerai -TKI yang belum bercerai
5.	- Reni - Bari	Masyarakat -TKI yang sedang memproses cerai -TKI yang sedang memproses cerai
6.	-Ermi -Tika	Masyarakat -TKI yang sudah bercerai -TKI yang sudah bercerai

Sumber: Olahan Peneliti: 2018

Dasar penentuan informan adalah seperti yang dijelaskan di paragraf sebelumnya bahwa narasumber secara khusus dapat memberikan informasi terkait penelitian dan narasumber tersebut dianggap penting dan utama.

3.5.2 Studi Pustaka

Studi pustaka berfungsi sebagai dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dicoba. Dasar ilmiah tersebut penting dan harus dipahami sebelum pelaksanaan percobaan berlangsung, karena apa yang peneliti lakukan adalah penelitian ilmiah, bukan sekunder mencoba (*trial and error*).⁴² Studi pustaka dapat dipelajari dengan mempelajari dan memahami isi literatur (buku), jurnal, dokumen, baik dokumen resmi maupun dokumen pribadi. Studi pustaka sangat berguna dalam penelitian karena sesuai dengan penelitian dan bersifat ilmiah serta sesuai dengan konteks.⁴³

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan yaitu dengan cara deskriptif kualitatif yang berpatokan pada pandangan Bogdan dan Biklen⁴⁴, yang selanjutnya data temuan lapangan yakni di Dinas Ketenagakerjaan dan narasumber yang terlibat terkumpul diorganisasikan, diseleksi, disintesis untuk mencari apa yang penting dan yang dipelajari, kemudian, dideskripsikan secara menyeluruh dan dianalisis.

⁴²Yogi Sugito. *Metodologi Penelitian*. Malang: Ub Press. 2009. Hlm 22

⁴³Lexy J. Moleong, *op.cit.* hlm. 217

⁴⁴*Ibid.* hlm. 248.

Sehingga, analisis data akan menghasilkan sebuah kesimpulan umum yang mampu menjawab permasalahan penelitian seperti misal apakah pelayanan kependudukan di kelurahan sudah efektif atau malah menimbulkan persoalan lain. Langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai kemampuan daya peneliti untuk pembuat kesimpulan penelitian.⁴⁵

Di akhir penelitian terkait pelayanan administrasi kependudukan, penulis menarik kesimpulan, dimana pada tahap kesimpulan yakni memunculkan problem, dan problem tersebut dimunculkan di rekomendasi. Ada beberapa cara dalam melakukan analisis data. Peneliti menggunakan model penulisan kualitatif versi Miles dan Huberman. Selain itu, model Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh⁴⁶. Ada tiga unsur menurut Miles dan Huberman dalam Husaini Usman diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan atau verifikasi.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Sugiyono. *Op.cit.*hlm. 91.

⁴⁷Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009. Hlm.84.

Pertama, reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan⁴⁸. Selain itu, dengan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, seperti misalnya pada penelitian kualitatif tujuan utama reduksi data adalah sebuah temuan.

Kedua, penyajian data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁹ Penyajian data memberikan kemudahan bagi peneliti untuk membuat kesimpulan dengan menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami.

misalnya dalam bentuk grafik, matrik, *network* dan *chart* maupun bagan. Untuk memudahkan peneliti yakni dengan memilah data-data primer dan sekunder yang kemudian oleh peneliti diolah menggunakan indikator konsep dan teori, yang selanjutnya data tersebut dibungkan melalui bagan grafik ataupun lainnya yang mudah dipahami.

⁴⁸*Ibid.* hlm.85.

⁴⁹*Ibid.* hlm.87.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Dalam bab empat ini akan membahas bagaimana kondisi tingkat perceraian di Kabupaten Ponorogo dan siapa saja aktor-aktor pelaku penanganan masalah perceraian di Kabupaten Ponorogo. Bab ini berfungsi agar pembaca mengetahui gambaran umum yang ada di Kabupaten Ponorogo dan siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan perancangan pembuatan peraturan daerah (perda) pelarangan cerai bagi TKI sebelum masa kontrak kerjanya habis dan bagaimana kondisi perceraian yang ada di Kabupaten Ponorogo..

4.1 Kondisi Perceraian Di Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo menjadi daerah dengan angka perceraian yang lumayan banyak di provinsi Jawa Timur. Perceraian yang terjadi di Kabupaten Ponorogo kebanyakan bekerja keluar negeri atau berprofesi sebagai TKI. Mengapa demikian karena banyaknya masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang menjadi TKI dan mereka ingin bercerai itu dengan berbagai motif misalnya seperti motif ekonomi dan suka dengan orang lain selain itu suami atau istrinya tidak mempunyai pekerjaan dan banyak tuntutan. Berikut adalah data yang akan disajikan oleh peneliti yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 sampai dengan 2017.

Tabel 4.1**Data Kasus Perceraian Tahun 2014-2017 di Kabupaten Ponorogo**

No	Tahun	Jumlah
1.	2014	2.091
2.	2015	2.015
3.	2016	2.170
4.	2017	1.940

Sumber : Pengadilan Agama 2018

Pada Tabel di atas dijelaskan bahwa peningkatan angka perceraian terjadi pada Tahun 2015-2016 yaitu dari 2.015 menjadi 2.170, di tahun 2014-2015 mengalami penurunan yaitu dari 2.091 menjadi 2.015 itupun sangat sedikit sekali penurunannya di tahun 2016-2017 juga mengalami penurunan juga yaitu dari 2.170 menjadi 1.940. Jumlah angka perceraian di Kabupaten Ponorogo seakan-akan menjadi tren karena angka perceraian tersebut lumayan tinggi angkanya.

TKI menggugat cerai pasangannya lantaran berbagai motif antara lain Seperti, motif ekonomi, perselingkuhan menjadi salah satu alasan mereka untuk bercerai misalnya motif ekonomi tersebut saat di kampung suaminya tidak mempunyai pekerjaan atau pekerjaanya tidak yang berpenghasilan tinggi seperti misalnya petani dan menuntut yang lebih kepada istrinya.

sedangkan ketika sudah bekerja di luar negeri dia sudah mempunyai uang yang banyak dan merasa lebih memiliki penghasilan yang tinggi dari istri atau suaminya jadi merasa lebih mudah untuk meninggalkannya. kalau yang motif perselingkuhan itu dimana saat di luar negeri suka dengan orang yang ada disana atau yang di rumah sudah mencari pengganti yang baru karena merasa lama di tinggal di luar negeri dan merasa tidak di perhatikan.

4.2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Ponorogo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas sebagai pelaksana dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Salah satu pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah kebijakan yang menyangkut permasalahan tenaga kerja. Untuk melakukan penanganan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) perlu dilakukan dengan upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah, juga peran serta masyarakat luas dalam pelaksanaan pemberdayaan.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sendiri mempunyai tugas dan fungsi yang cukup spesifik yakni mengurus masalah sosial, Tenagakerja, transmigrasi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kewenangannya berupa meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja maupun permasalahan Sosial dan Transmigrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan adanya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharap dapat menciptakan kesejahteraan tenaga kerja dan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang dinas tersebut..

4.3 Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengadilan Agama mempunyai wewenang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pernikahan. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bertugas sebagai pelaksana dalam kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, salah satu pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Agama adalah kebijakan yang menyangkut permasalahan pernikahan. Untuk melakukan penanganan terhadap kasus Pernikahan perlu dilakukan dengan upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah, juga peran serta masyarakat luas dalam pelaksanaannya.

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo sendiri mempunyai wewenang yang cukup spesifik yakni mengurus masalah pernikahan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Kewenangannya berupa mengenai gugatan perceraian, mediasi, pembatalan pernikahan dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam urusan pernikahan. Dengan adanya Pengadilan agama diharapkan bisa menyelesaikan konflik permasalahan pernikahan yaitu perceraian, dan juga diharapkan bisa mengurangi angka perceraian yang tinggi saat ini di kabupaten Ponorogo.

4.4 DPRD Kabupaten Ponorogo.

DPRD Kabupaten Ponorogo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD mempunyai wewenang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pembuatan peraturan Daerah. DPRD Kabupaten Ponorogo bertugas sebagai pelaksana dalam kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo, salah satu pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab DPRD adalah kebijakan yang menyangkut permasalahan pembuatan Peraturan Daerah. Untuk melakukan penanganan terhadap kasus Pernikahan perlu dilakukan dengan upaya koordinasi secara terpadu dengan mengikut sertakan seluruh komponen, baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah, juga peran serta masyarakat luas dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini DPRD diharapkan segera menerbitkan perda yang mengenai tentang TKI yang beberapa tahun lalu sudah di bahas di sana.

BAB V

PEMBAHASAN SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM MENANGGULANGI KASUS PERCERAIAN KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KABUPATEN PONOROGO

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan di suatu daerah tentu tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan koordinasi dengan stakeholder lainnya. Artinya perlu ada sinergi atau kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan logika umum tentang koordinasi adalah mengatur sesuatu sesuai bagian masing-masing agar terciptanya suatu tujuan. Setiap organisasi baik organisasi swasta atau masyarakat tidak lepas dari yang namanya koordinasi, baik koordinasi berbentuk satu arah atau lebih dari satu arah.

Pengkoordinasian sangat penting dilakukan oleh setiap pemimpin dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya informasi yang jelas, komunikasi yang tepat dan pembagian pekerjaan kepada anggotanya atau bawahannya yang diberikan oleh pimpinan atau pemerintah, maka setiap anggota organisasi atau individu akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo salah satunya diakibatkan oleh adanya aturan yang membolehkan TKI yang masih berada di luar negeri dapat menggugat cerai pasangannya melalui jasa pengacara.

Dalam aturan tersebut, pihak pengacara mendapat surat kuasa dari TKI yang diberikan melalui kedutaan besar Indonesia di luar negeri. Dengan surat kuasa tersebut, persidangan dapat berjalan dengan mewakilkan pihak yang berperkara (TKI) kepada pengacara.⁵⁰ Kemudahan prosedur perceraian tersebut banyak dimanfaatkan oleh TKI, sehingga membuat tingginya kasus perceraian dengan di dominasi gugat cerai dari tenaga kerja wanita (TKW) yang masih berada di luar negeri.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Larangan Cerai bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum masa kontrak kerjanya habis, sudah lama di rencanakan atau di bicarakan di DPRD Kabupaten Ponorogo. Pada tanggal 3 April 2015 sudah dilakukan penggelaran uji publik dan dengar pendapat (hearing) publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo terkait dengan Perda larangan cerai bagi TKI.

Dalam dengar pendapat saat itu disebutkan bahwa Perda tentang larangan TKI bercerai akan dijadikan sebagai salah satu pasal dalam Perda tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ponorogo. Perda ini juga rencananya akan mengatur tentang kejelasan pengasuhan anak yang bakal ditinggalkan oleh calon TKI. Perda yang lebih bersifat privasi bagi TKI ini dijadwalkan akan terbit pada Juni 2015.⁵¹

⁵⁰Pranita Kusumaningrum, "TKI Dominasi Angka Perceraian di Ponorogo" http://beritajatim.com/hukum_kriminal/272781/tki_dominasi_angka_perceraian_di_ponorogo.html, diakses tanggal 27 mei 2018, pukul 22.37.

⁵¹DiliEyato, "DPRD Godog Perda TKI Dilarang Bercerai", <https://daerah.sindonews.com/read/984740/151/dprd-godok-perda-tki-dilarang-bercerai1428026647>, diakses tanggal 28 mei 2018, Pukul 21:30

Namun, sampai saat ini Perda tersebut belum disetujui dan diterbitkan. Padahal sudah berselang tiga tahun dari sejak Perda tersebut direncanakan. Peraturan Daerah terakhir yang diterbitkan adalah Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri,⁵² namun di dalamnya belum terdapat pasal atau poin yang membahas tentang larangan perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dan pasal yang mengatur tentang kejelasan pengasuhan anak yang akan ditinggalkan oleh calon TKI sebagaimana yang dimaksud sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,⁵³ namun tidak semua pernikahan dapat berjalan mulus dan selaras dengan tujuan awalnya. Banyak keluarga yang di tengah-tengah perjalanan rumah tangganya terjadi salah paham dan konflik yang tidak dapat dihindarkan, sehingga perceraian menjadi satu-satunya jalan yang harus diambil untuk mengakhiri hubungan yang telah dijalin dengan baik. Perceraian merupakan ketetapan pemutusan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri akibat gagalnya tujuan pernikahan karena perbuatan manusia itu sendiri. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu.

⁵²Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2016 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2016 oleh Gubernur Jawa Timur.

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (dissolution marriage).⁵⁴ Untuk itu sesuai dengan temuan peneliti lapangan peneliti menggunakan teori koordinasi sebagai pendekatan untuk menganalisis mengenai bagaimana sinergi lintas sektor dalam mengatasi permasalahan banyaknya angka perceraian di Kabupaten Ponorogo. Dalam koordinasi kita harus memperhatikan poin-poin tertentu dalam pelaksanaan Koordinasi. Untuk itu ada 3 point yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ponorogo dalam pelaksanaan koordinasi.

5.1 Tindakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran dari setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan tugasnya bersama anggota atau satuan organisasi lainnya. Agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu yang menangani permasalahan perceraian TKI sehingga terdapat adanya keserasian di dalam pencapaian hasil. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengatur usaha-usaha kegiatan untuk menangani permasalahan perceraian ini melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten ponorogo.

⁵⁴Putri Novita Wijaya, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan" (Skripsi-Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2008),

Dimana instansi dibawah pemerintah Kabupaten yakni Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah yang menengani masalah Tenaga Kerja Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko selaku ketua komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo:⁵⁵

“Sebenarnya pemerintah tidak tinggal diam dalam permasalahan perceraian TKI dimana permasalahan tersebut di Kabupaten Ponorogo cukup tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sudah merencanakan membuat Perda tentang Larangan Cerai bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah lama di rencanakan atau di rembukkan di DPRD Ponorogo. Tapi hingga sekarang Perda tersebut belum jadi.”

Dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan perceraian yang kebanyakan berprofesi sebagai TKI di kabupaten ponorogo ini dimana angka perceraianya cukup tinggi, pemerintah sudah merencanakan suatu kebijakan yakni berupa membuat Peraturan Dearah Kabupaten Ponorogo mengenai Larangan Bercerai bagi TKI sebelum kontrak kerjanya habis. Apabila di pikir secara logika peraturan tersebut lebih mengatur dalam kehidupan privasi TKI itu sendiri tetapi jika tidak dilakukan seperti itu angka Perceraianya tidak akan menurun malah bisa jadi bertambah lagi. Namun usaha yang masih direncanakan tersebut adalah usaha pemerintah untuk menekan angka tingginya perceraian di Kabupaten Ponorogo. Untuk itu koordinasi yang berupa tindakan pemerintah dalam mengatasi perceraian di Kabupaten Ponorogo diantaranya sebagai berikut:

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Eko selaku kepala komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 19 April 2018, pukul 08.45 WIB.

5.1.1 Pembinaan dan Pendidikan TKI oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo Melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo Terhadap calon TKI

Tindakan pemerintah selain dalam perencanaan Perda mengenai larangan cerai bagi TKI sebelum masa kerja atau kontrak kerjanya habis di Kabupaten Ponorogo, pemerintah Daerah Juga bekerja sama dengan Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan pembinaan bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri. Pembinaan tersebut dilakukan di Aula Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah memberi bekal dan pengetahuan bagi calon TKI mengenai Peraturan TKI, prosedur pemberangkatan TKI, hingga syarat-syarat menjadi TKI.

Dimana nantinya para calonn TKI ini sudah memahami mengenai peraturan tenaga kerja, hingga persyaratan dari calon TKI itu sendiri. Selain pembinaan Dinas sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga memberikan Pendidikan yang diberikan kepada calon TKI yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan gambaran kehidupan TKI serta dampak gambaran kemungkinan yang terjadi ketika bekerja di luar negeri.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sumani Selaku Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo:⁵⁶

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Sumani selaku kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, pada tanggal 6 November 2018, pukul 08.45 WIB.

“Pembinaan yang dilakukan pemerintah melalui Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi terhadap TKI adalah mengenai Prosedur pemberangkatan TKI oleh Perseroan Terbatas (PT), persyaratan TKI, serta peraturan mengenai Tenaga kerja. Tujuan dari pembinaan tersebut adalah untuk membekali para calon TKI sebelum pemberangkatan dilakukan oleh PT. selain pembinaan Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi juga memberikan Pendidikan yang dirasa sangat penting bagi calon TKI. Pendidikan tersebut mengenai bagaimana nantinya mereka akan meninggalkan keluarga, kehidupan TKI yang jauh dari keluarga, serta beradaptasi dilingkungan yang baru.”

Pembinaan dan Pendidikan yang diberikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan transmigrasi yang diselenggarakan di aula Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo ini adalah bertujuan untuk membekali pengetahuan bagi para calon TKI mengenai prosedur pemberangkatan TKI, Peraturan tenaga kerja, syarat-syarat TKI, hingga Pendidikan mengenai kehidupan TKI yang jauh dari keluarga harus beradaptasi di lingkungan yang baru.

Hal tersebut dirasa sangat penting untuk memberikan pengetahuan bagi para calon TKI yang akan bekerja keluar negeri. sehingga nantinya mereka sudah memiliki modal pengetahuan dari hasil pembinaan dan Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi. Selain itu dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini tentunya tidak berjalan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain disini Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Perseroan terbatas (PT).

5.1.2 Perijinan Surat Pernyataan Anggota Keluarga Bagi Calon TKI.

Selain pembinaan dan Pendidikan yang berupa pembekalan mengenai peraturan tenaga kerja, prosedur pemberangkatan TKI, serta persyaratan TKI, tindakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan usaha untuk menimalisir angka perceraian TKI dengan cara calon TKI yang akan bekerja keluar negeri harus memberikan surat ijin berupa surat pernyataan dari anak, suami, anggota keluarga calon TKI. seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Sumani :⁵⁷

“Dinsosnakertrans Kabupaten Ponorogo mewajibkan bagi semua calon TKI untuk memberikan pernyataan yang disetujui oleh keluarga bahwa akan bekerja keluar negeri, dari suami, anak , maupun pihak keluarga. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kasus perceraian TKI”

Bagi para calon TKI yang akan bekerja keluar negeri wajib untuk memberikan surat ijin berupa surat pernyataan dari anggota keluarga calon TKI yang meliputi anak, suami, maupun anggota keluarga lain. Hal tersebut bertujuan untuk menimalisir masalah perceraian yang sering terjadi pada TKI selama ini. Surat pernyataan tersebut dibuat oleh pihak keluarga calon TKI yang berisikan mengenai pemberian ijin kepada calon TKI yang bersangkutan untuk bekerja keluar negeri. Menurut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Ponorogo.

hal tersebut dirasa sangat penting, selain maraknya kasus perceraian TKI, mengingat menjadi TKI itu harus mendapat perijinan dari keluarga agar tidak menambah permasalahan dalam keluarga yang berujung pada keretakan rumah tangga atau sampai terjadi perceraian.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sumani selaku kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, pada tanggal 6 November 2018, pukul 08.45 WIB.

5.1.3 Proses Mediasi yang dilakukan Oleh Pengadilan Agama Kabupaten

Ponorogo

Salah satu tindakan pengadilan agama adalah mediasi merupakan cara penyelesaian konflik perceraian melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁵⁸

Mediator sangat menentukan efektifitas proses penyelesaian sengketa perceraian, mediator harus secara layak memenuhi kualitas tertentu serta berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi agar mampu mengarahkan para pihak yang bersengketa dengan hasil yang diharapkan.⁵⁹ Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah perceraian selanjutnya adalah mediasi melalui pengadilan agama Kabupaten Ponorogo. Mediasi dilakukan di Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo dengan Hakim yang menjadi mediator atau penengah dalam mengatasi konflik perceraian yang terjadi. Menyikapi masalah tersebut, maka melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penyempurnaan terhadap

⁵⁸Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82

⁵⁹Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 133.

Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahwa berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 dan atau Pasal 154 yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 130 / 154 bahwa sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu diupayakan perdamaian diantara para pihak oleh majelis hakim. Menurut yang diungkapkan oleh Bapak Istadjam S.H selaku Panitera muda di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo:⁶⁰

“Dalam melakukan proses mediasi tentu kita harus melewati berbagai proses, Sebelum mediasi ada tahap yang dinamakan Tahap Pramediasi. Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa, mediator hanya bertindak sebagai fasilitator saja”.

Gugatan sebelum mediasi ada tahap yang dinamakan tahap pramediasi dimana parapihak penggugat dan tergugat mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi. Dengan mediasi diharapkan tercapainya titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi ditangan para pihak yang bersengketa.

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Istadjam S.H selaku panitera muda Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 19 April 2018, pukul 10.45 WIB.

Mediator menolong para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung, selama dalam proses perundingan-perundingan mediator harus tetap bersikap netral, membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa yang bisa diterima oleh para pihak, mendengarkan secara aktif menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan dan menitikberatkan persamaan-persamaan, yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa.

5.1.4 Faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

Dalam pelaksanaan mediasi tentu akan terjadi beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses jalanya mediasi tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses mediasi di Pengadilan Kabupaten Ponorogo itu gagal. Faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi gagal menurut hasil wawancara dari bapak Istadjam S.H.⁶¹

“Yang pertama, penggugat tidak datang dalam proses mediasi, maka hakim tidak dapat mendamaikan perkara dan mediasi dinyatakan gagal. Yang kedua, penggugat tidak datang dalam proses mediasi, maka hakim tidak dapat mendamaikan perkara, dan mediasi dinyatakan gagal. Ketiga, penggugat dan tergugat memegang prinsip masing-masing tanpa ada yang mau mengalah”.

⁶¹Wawancara dengan Bapak Istadjam S.H selaku panitera muda Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 19 April 2018, pukul 10.45 WIB.

Pertama, Penggugat tidak datang menghadap forum mediasi apabila penggugat tidak datang menghadap forum mediasi, Maka hakim mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses Mediasi, karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, karena tidak adanya keseriusan dalam menjalani proses mediasi, Maka proses mediasi dinyatakan gagal oleh hakim mediator.

Yang Kedua, Tergugat tidak datang menghadap forum mediasi, apabila pihak Tergugat tidak datang menghadap forum Mediasi, maka Hakim Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses mediasi. karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator.

Yang Ketiga, Apabila setelah diberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap mempertahankan prinsip masing-masing tanpa ada yang mau mengalah, yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali dalam forum mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Selain sebuah tindakan mediasi dimana bagian dari koordinasi yang dilakukan oleh Pengadilan agama kabupaten Ponorogo dalam membantu pemerintah dalam mengatasi masalah banyaknya angka perceraian yang di dominasi oleh TKI .

5.2 Peran Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebutkan di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

Saat ini kasus perceraian di kabupaten ponorogo cukup tinggi. Angka perceraian tersebut mencapai angka 7520 jiwa pada tahun 2014. Jumlah angka sebanyak itu membuat Kabupaten ponorogo menduduki peringkat pertama dalam kasus perceraian di Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, diperlukan pengelolaan organisasi yang baik dan benar dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki, terutama sumber daya manusianya.

Dari hasil penemuan penelitian, peneliti mendapatkan bahwa kurangnya peran komunikasi organisasi yang terus berjalan dalam mengatasi permasalahan perceraian. Contohnya saja Perda larangan cerai bagi para TKI sebelum masa kerja atau kontrak kerjanya habis yang tak kunjung diselesaikan. Hal tersebut menandakan kurangnya peran komunikasi organisasi. Seharusnya perda tersebut segera diselesaikan mengingat permasalahan perceraian di kabupaten ponorogo sangat banyak dan tinggi.

Peran komunikasi organisasi sangat mempengaruhi serta membantu dalam proses pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPRD, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo seharusnya menyadari pentingnya komunikasi dalam berorganisasi yang harus dijalin dengan baik dalam mengatasi permasalahan angka perceraian yang tinggi tersebut. Kurangnya Komunikasi yang terjalin dengan baik ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa Pemerintah Kabupaten Ponorogo hingga saat ini kasus Perceraian paling tinggi khususnya kebanyakan adalah berprofesi sebagai TKI. Apabila dikaitkan dengan teori yang penulis ambil yaitu dari teori koordinasi. Kurangnya peran komunikasi dalam tindakan pemerintah mengatasi masalah perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo. Karena peran komunikasi organisasi berfungsi sebagai Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial yang lain.

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dengan melalui

informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikan kepada orang. Dalam perencanaan peraturan undang-undang yang tak kunjung selesai, disebabkan karena kurangnya peran komunikasi didalamnya. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo tidak mampu merubah tindakan bawahanya dalam pelaksanaan perencanaan undang-undang mengenai larangan bercerai bagi TKI.

5.3 Pembagian Kerja

Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of Labor*). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi.

Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilahan bagian-bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah orang. Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

Pembagian kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi permasalahan perceraian TKI sudah jelas dimana instansi dibawah pemerintah Daerah Yakni Disnakertrans, Pengadilan Agama, DPRD yang mempunyai wewenang dengan tugas masing-masing sebagai instansi pemerintah dalam menangani permasalahan tertentu.

5.3.1 Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam menangani Kasus Perceraian TKI.

Dalam pembagian kerja pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo bertugas untuk pelaksanaan Mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian konflik melalui proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan.⁶² Menurut yang diungkapkan oleh Istajam S.H selaku panitera muda pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo:⁶³

⁶²Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 82

⁶³Wawancara dengan Bapak Istajam S.H selaku panitera muda Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 19 April 2018, pukul 10.45 WIB.

“Pelaksanaan mediasi ini dilakukan oleh Pengadilan agama dimana Hakim menjadi mediator. Proses mediasi ini adalah untuk menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik. Proses mediasi ini kebanyakan gagal karena beberapa faktor tertentu, diantaranya penyebabnya adalah salah satu pihak tidak datang dalam proses mediasi. Sehingga dinyatakan gagal.”

Dalam menangani kasus perceraian di Kabupaten ponorogo pengadilan agama berperan dalam menangani masalah tersebut. Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo berperan dalam proses mediasi. Proses mediasi adalah proses penyelesaian konflik dengan hakim menjadi mediator atau penengah dalam penyelesaian konflik. Selama ini proses mediasi yang dilaksanakan di pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo kebanyakan gagal karena beberapa faktor. Faktor penyebabnya antarlain adalah salah satu pihak tidak datang dalam proses persidangan, pihak penggugat maupun pihak tergugat. Hal tersebut menyebabkan proses mediasi gagal.

5.3.2 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo Dalam Menangani Kasus perceraian TKI

Tugas dan Pokok tentunya sudah disandang bagi insatansi pemerintah. Untuk itu Hal tersebut sudah umum apabila peneliti akan membahas tugas pokok atau pembagian kerja tersebut. Peneliti akan membahas penemuan dilapangan mengenai pembagian kerja yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi itu sendiri bertugas menangani masalah tenaga kerja. Dalam hal permasalahan perceraian TKI dikabupaten Ponorogo, Dinsosnakertrans mendapati pembagian kerja mengenai pembinaan dan Pendidikan yang harus diberikan kepada Para calon TKI. Seperti yang diungkapkan bapak Sumani selaku Ketua Disnakertransos:⁶⁴

“Untuk masalah pembagian kerja atau program kerja dalam menangani kasus perceraian TKI yakni pada saat pembinaan dan pendidikan yang diberikan kepada TKI serta peroses perijinan bagi para calon TKI yang akan berangkat”, untuk selebihnya tidak ada.”

Pembagian kerja yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah program mengenai pembinaan dan pendidikan bagi para calon TKI yang bertujuan untuk pembekalan bagi para calon TKI.

Dimana pendidikan tersebut mengenai para calon TKI akan meninggalkan negara serta jauh dari keluarga yang mempunyai dampak-dampak tertentu. Pembagian kerja dirasa sangat penting dalam koordinasi untuk mencapai harapan yang di inginkan

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Sumani selaku kepala dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi, pada tanggal 6 November 2018, pukul 08.45 WIB.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab bab sebelumnya dengan fokus implementasi penanganan anak jalanan di Kota Malang, maka penulis akan menarik kesimpulan yang berupa jawaban atas penggunaan teori pada analisis permasalahan

6.1 Kesimpulan.

Berdasarkan analisis, yang dilakukan peneliti mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas di Desa karangpatihan dalam konteks pekerjaan social yaitu yang *pertama*, Dari hasil penemuan penelitian, peneliti mendapatkan bahwa kurangnya peran komunikasi organisasi yang terus berjalan dalam mengatasi permasalahan perceraian. Contohnya saja Perda larangan cerai bagi para TKI yang tak kunjung di implementasikan.

Hal tersebut menandakan kurangnya peran komunikasi organisasi. Seharusnya perda tersebut segera diselesaikan mengingat permasalahan perceraian di kabupaten ponorogo sangat tinggi. Peran komunikasi organisasi sangat mempengaruhi serta membantu dalam proses pencapaian tujuan pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Kedua*, terdapat Faktor faktor yang memepengaruhi gagalnya proses mediasi. Yakni Penggugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi Apabila Penggugat tidak datang menghadap forum Mediasi, maka Hakim Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses Mediasi.

karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, karena tidak adanya keseriusan dalam menjalani proses Mediasi, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Tergugat Tidak Datang Menghadap Forum Mediasi Apabila pihak Tergugat tidak datang menghadap forum Mediasi, maka Hakim Mediator tidak dapat mendamaikan perkara perceraian yang dilakukan proses Mediasi, karena yang berperkara hanya satu pihak saja yang hadir, maka proses Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Apabila setelah diberikan arahan kepada Penggugat dan Tergugat, keduanya tetap mempertahankan prinsip masing-masing tanpa ada yang mau mengalah, yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali dalam forum mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Mediasi dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator. Selain sebuah tindakan mediasi dimana bagian dari koordinasi,

Ketiga, Dalam koordinasi Pembagian kerja, seharusnya terdapat program yang lebih spesifik Dalam melaksanakan penanganan kasus perceraian TKI. Contohnya dalam menangani masalah faktor-faktor yang menyebabkan proses mediasi itu gagal. Dimana sangat terlihat bagaimana kurangnya koordinasi dalam mengatasi faktor-faktor tersebut.

6.2 Rekomendasi

Dari pembahasan di atas dapat ditarik menjadi 2 (dua) rekomendasi, yakni tentang kebijakan penanganan kasus perceraian TKI dan kendala-kendala dalam penanganan kasus perceraian TKI tersebut.

1. Peningkatan peran komunikasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menangani masalah perceraian TKI.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Disnaker, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo seharusnya menyadari pentingnya komunikasi dalam berorganisasi yang harus dijalin dengan baik dalam mengatasi permasalahan angka perceraian yang tinggi tersebut. Kurangnya Komunikasi yang terjalin dengan baik ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa Pemerintah Kabupaten Ponorogohingga sampai saat ini kasus Perceraian paling tinggi khususnya para TKI. Untuk itu sebaiknya pemerintah Kabupaten Ponoogo meningkatkan koordinasi yakni perna komunikasi masing-masing aktor dalam menangani masalah perceraian di Kabupaten Ponorogo.

2. Pembuatan Perda Mengenai Larangan Cerai bagi TKI Seharusnya lebih di percepat lagi.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo mengenai pelarangan perceraian bagi yang masih di rembukkan sebaiknya segera untuk diselesaikan. Mengingat masalah perceraian di Kabupaten Ponorogo yang tinggi. Bahkan hingga saat ini perda tersebut belum ada pembahasan lebih lanjut lagi. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo tidak mampu merubah tindakan bawahanya dalam pelaksanaan perencanaan undang-undang mengenai larangan bercerai bagi TKI.

3. **Membuat Program dan Kebijakan Lebih Khusus Dalam Menangani Masalah Perceraian TKI**

Program atau kebijakan tersebut dapat berupa misalnya dalam proses mediasi apabila penggugat atau tergugat melakukan mediasi maka penggugat atau tergugat pula kedua duanya harus dating ke persidangan. Apabila kedua belah pihak mendatangi persidangan maka hal tersebut akan mempermudah mediator untuk melaksanakan mediasi.



Daftar Pustaka

Buku

- Andreas Afriando.2014.*Strategi Advokasi Berjejaring Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang*. Skripsi, Universitas Brawijaya Malang.
- Ayu Wulan Puspitasari.2010.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Migrasi Sirkuler di Kabupaten Semarang*, Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Azwar Saifuddin.2001.*Metode Penelitian.Pustaka Pelajar*.Yogyakarta.Hal 5.
- Bungin dan Burhan.2006.*Metodologi Peneliiian Kualitatif*. Jakarta.Hal 126
- Febri Adi Samudro.2010.*Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Migrasi Ke luar Negeri*.Skripsi.Universitas Brawijaya Malang.
- James A. Black dan Dean J. Champion.2010.*Metode dan Masalah Penelitian sosial*. Bandung, PT Refika Aditama. Hal 306
- Lexy J. Moloeng.2003. *Metodologi Penelitan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003. Hal 6.
- Muhammad Rizal.2010.*Keputusan Migrasi Sirkuler Pekerja Sektor Formal di Kota Medan*.Skripsi.universitas Negeri Medan.
- Malayu S.P Hasibuan.2011. *Manajemen Dasar,Pengertian, dan Masalahnya*.Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 22
- Richard Lungan.2006.*Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*.Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 13.
- Sugiyono.2010.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.Hal 2.
- Tri Andias.2014.*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Migran Bekerja Di Dalam Negeri Dan Di Luar Negeri*.Skripsi.Universitas Brawijaya Malang.

Internet

<http://www.naker.go.id>. "Jumlah penduduk yang bekerja sebagai TKI atau jumlah buruh migran perempuan keluar negeri". [online]. Tersedia: diakses pada tanggal 12 September 2015.

<http://www.bnp2tki.go.id>. "Jumlah TKI keluar negeri Kabupaten atau Kota". [online]. Tersedia: diakses pada tanggal 5 Agustus 2014.

<http://www.berita.jatim.go.id>. "Hukum kriminal perceraian yang angka perceraian tinggi di dominasi oleh TKI di Kabupaten Ponorogo". [online]. Tersedia: diakses pada tanggal 21 November 2017.

<http://www.kompas.com>. "Rancangan perda yang melarang TKW atau TKI mengajukan cerai di pengadilan sudah dibahas di DPRD Ponorogo. Bahkan rancangan perda sudah konsultasikan ke Pemprop Jawa Timur". [online]. Tersedia: edisi Selasa 8 November 2016.

<http://www.beritajatim.com>. "TKI dominasi angka perceraian di Ponorogo". [online]. Tersedia Di akses pada tanggal 21 November 2017.

<http://www.surabayapost.co.id>. "Dalam isi surat kabar tersebut di jelaskan bahwa Rancangan perda yang melarang TKW atau TKI mengajukan cerai di pengadilan sudah dibahas di DPRD Ponorogo. Bahkan rancangan perda sudah konsultasikan ke Pemprop Jawa Timur..". *Kompas.com*, edisi Selasa 8 November 2016.

